KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung DPR Ditinjau Ulang
Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

PDIP MINTA RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG DPR DITINJAU ULANG

Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi dana ke hal yang lebih penting.

Danang Firmanto
danang.firmanto@tempo.co.id

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta supaya rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau ulang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana Dewan membangun gedung baru itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. "Situasi saat ini, tantangan perekonomian kita, banyak skala prioritas yang harus segera dijalankan oleh presiden," ujarnya di kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu lalu.

Selain itu, Hasto melanjutkan, rencana pembangunan gedung baru tersebut mendapat kritik dan penolakan publik. Ia meminta Dewan dan Kementerian Keuangan bertemu untuk meninjau kembali rencana pembangunan gedung. Untuk itu, ujarnya, Fraksi PDIP di parlemen telah diminta mendorong supaya langkah tersebut bisa terwujud. "Kami akan meminta kepada Fraksi PDIP untuk mencoba realokasi anggaran kepada hal yang jauh lebih prioritas," kata Hasto.

Rabu lalu, Dewan bersama pemerintah sepakat memasukkan anggaran pembangunan gedung itu di APBN 2018. DPR mendapat alokasi dana sebanyak Rp 5,7 triliun. Jumlah itu naik dari tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebanyak Rp 601 miliar dari dana itu akan dikucurkan untuk pembangunan gedung baru. Rinciannya adalah Rp 320 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate, setuju dengan pendapat Hasto. Menurut dia, rencana pembangunan DPR itu perlu ditinjau ulang. Ia menyarankan agar Kementerian PUPR membuat kajian kelayakan gedung DPR. "Gedungnya masih bisa dipakai. Kalau dianggap kurang bagus, mana rekomendasi teknisnya?" ujar dia.

Sikap partai-partai lain masih beragam. Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono ngotot supaya pembangunan gedung baru segera dilakukan. Alasannya, gedung yang ada sekarang ia anggap kurang layak. "Menurut saya, memang harus, menjadi suatu keharusan yang sangat mendesak," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan hal senada. Ia menyebutkan, menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kondisi gedung di Nusantara I sudah miring. Selain itu, penghuninya sudah melebihi kapasitas. "Empat kali beban seharusnya," kata dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah. "DPR harus memastikan perencanaan obyektif, anggaran efisien," kata dia, yang menginginkan pembangunan terhindar dari sentimen negatif publik.

Sedangkan politikus Partai Gerindra, Desmond Mahesa, meminta ada argumen yang jelas terlebih dulu perihal urgensi pembangunan gedung. Partainya, kata dia, masih akan mempelajari rencana pembangunan tersebut sebelum mengambil sikap. "Kita buktikan, bukan sekadar ilmiah tapi jadi kebutuhan apa tidak," tutur dia. ● BUDIARTI UTAMI PUTRI

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

POLEMIK SEJAK 10 TAHUN LALU

KEINGINAN para anggota Dewan membangun gedung baru telah muncul 10 tahun silam.

2006
Tim Kajian Peningkatan Kinerja bentukan DPR menyatakan bahwa ruang sidang Dewan dinilai tidak nyaman. Sejak saat itu, muncul rencana pembangunan gedung baru DPR.

2008-2009
Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung baru DPR berbentuk huruf U terbalik.

April 2011
ICW melaporkan ke KPK dugaan penggelembungan pembangunan gedung DPR senilai Rp 602 miliar dari total anggaran Rp 1,138 triliun.

Mei 2011
Ketua DPR periode 2009-2014, Marzuki Alie, membatalkan rencana pembangunan gedung.

2014
Usul pembangunan gedung DPR muncul lagi.

Agustus 2015
Presiden Joko Widodo batal menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR.

4 Juli 2017
Usul pembangunan gedung kembali mencuat.

Oktober 2017
Anggaran gedung baru DPR disetujui.

● DANANG

TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



Gambar Menara Nusantara yang merupakan rencana gedung kantor untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

BELUM SATU SUARA

SIKAP partai-partai politik terhadap rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat belum bulat. Sebagian menolak, sebagian lain setuju, dan juga ada yang masih melakukan kajian.

	SETUJU	MENOLAK	BELUM MENENTUKAN SIKAP
Golkar	✔		
PKS	✔		
Hanura	✔		
PPP	✔		
Demokrat	✔		
PDIP		✔	
NasDem		✔	
PAN		✔	
PKB			✔
Gerindra			✔